

CULTUURSTELSEL DI UJUNG TIMUR PULAU JAWA: STUDI KASUS PENERAPAN TANAM PAKSA DI BANYUWANGI

Matali

MAN 2 Genteng Banyuwangi

Email : matali.s.pd.mm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara historis penerapan *Cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa di Kabupaten Banyuwangi pada masa kolonial Belanda, khususnya antara tahun 1830 hingga 1870. Fokus kajian diarahkan pada jenis tanaman yang diwajibkan, wilayah pelaksanaan sistem tanam paksa, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lanskap sosial-ekonomi lokal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menelusuri dinamika lokal dari kebijakan kolonial yang bersifat nasional, guna memperkuat pemahaman sejarah agraria Indonesia secara kontekstual dan mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan studi dokumen. Sumber data utama diperoleh dari arsip kolonial, laporan pemerintahan Hindia Belanda, literatur sejarah, serta dokumen lokal yang relevan. Teknik analisis dilakukan melalui kritik sumber, interpretasi kontekstual, dan rekonstruksi historis berbasis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Cultuurstelsel* di Banyuwangi diterapkan secara intensif melalui pemanfaatan wilayah pegunungan di Kalibaru, Giri, Glenmore, dan kaki Gunung Ijen untuk komoditas kopi, tebu, dan nila. Tanaman kopi menjadi komoditas utama yang ditanam di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial. Dampak sistem ini mencakup penurunan kesejahteraan petani lokal, pergeseran pola agraria, serta munculnya bentuk-bentuk resistensi kultural masyarakat. Selain itu, warisan fisik dari sistem ini masih dapat ditemukan dalam bentuk bangunan perkebunan, jalur distribusi, dan situs cagar budaya seperti Asrama Inggris dan Perkebunan Malang Sari. Studi ini menegaskan pentingnya pelestarian warisan sejarah lokal sebagai bagian dari narasi besar kolonialisme di Indonesia

Kata Kunci: *Cultuurstelsel, Tanam Paksa, Banyuwangi, Sejarah Kolonial, Kopi*

PENDAHULUAN

Sistem tanam paksa atau *Cultuurstelsel* yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1830 hingga 1870 merupakan salah satu bentuk eksploitasi ekonomi terhadap rakyat Hindia Belanda yang meninggalkan jejak panjang dalam sejarah sosial-politik bangsa Indonesia. Meskipun banyak studi telah membahas sistem ini secara makro, sangat sedikit perhatian diberikan pada dampaknya di wilayah-wilayah spesifik seperti Banyuwangi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Padahal, sebagai salah satu wilayah dengan lahan subur dan akses langsung ke pelabuhan, Banyuwangi memiliki peranan penting dalam sistem perkebunan kolonial, khususnya dalam komoditas kopi dan tebu. Dalam kerangka ini, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana *Cultuurstelsel* diterapkan di wilayah tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat lokal.

Menurut Ricklefs (2001), sistem tanam paksa pada dasarnya merupakan bentuk komersialisasi paksa atas tanah dan tenaga kerja penduduk pribumi demi kepentingan pemerintah kolonial. Sistem ini tidak hanya mengubah struktur agraria lokal, tetapi juga

memaksa masyarakat meninggalkan tanaman pangan demi menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Di wilayah Banyuwangi, penerapan sistem ini sangat terasa karena daerah ini ditetapkan sebagai salah satu sentra produksi kopi yang strategis (Elson, 1994). Akibatnya, terjadi pergeseran besar dalam sistem mata pencaharian dan ketahanan pangan masyarakat, yang pada gilirannya memperlemah struktur sosial komunitas lokal. Seperti diungkapkan oleh Breman (2010), *Cultuurstelsel* telah menciptakan hubungan kerja yang bersifat koersif dan bersandar pada hierarki kekuasaan kolonial dan priyayi lokal.

Urgensi kajian ini muncul dari kebutuhan untuk menggali sejarah lokal sebagai bagian dari konstruksi narasi sejarah nasional yang lebih inklusif dan berimbang. Dalam literatur sejarah kolonial, pendekatan yang digunakan cenderung berfokus pada Jawa bagian tengah dan barat sebagai lokasi utama implementasi tanam paksa. Padahal, wilayah ujung timur Jawa seperti Banyuwangi memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda sehingga penerapan sistem tanam paksa di wilayah ini juga memiliki kekhasan tersendiri (Boomgaard, 1991). Oleh karena itu, analisis spesifik terhadap Banyuwangi dapat memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang kompleksitas dan diversitas pengalaman kolonial di Indonesia.

Selain itu, dari sisi kebaruan (novelty), kajian ini menawarkan pendekatan yang lebih mikro dan kontekstual, dengan menempatkan narasi masyarakat lokal sebagai pusat analisis. Jika kebanyakan studi terdahulu lebih menyoroti aspek makro ekonomi kolonial, penelitian ini menggarisbawahi aspek sosial-budaya dan transformasi lokal akibat kebijakan kolonial. Sebagaimana ditegaskan oleh Stoler (2002), sejarah kolonial seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang institusi kekuasaan, tetapi juga dari pengalaman masyarakat biasa yang menjadi subjek kebijakan tersebut. Dalam konteks Banyuwangi, pengalaman petani lokal, transformasi struktur desa, dan dinamika hubungan antara elite lokal dan aparat kolonial menjadi sumber penting untuk memahami dampak jangka panjang dari tanam paksa.

Secara teoritis, kajian ini meminjam kerangka dari teori kolonialisme agraria (Colonial Agrarian Theory) yang mengungkap bagaimana kolonialisme tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mendisrupsi struktur agraria lokal (Wolf, 1982; Peluso & Vandergeest, 2001). Dalam konteks Banyuwangi, perubahan struktur kepemilikan tanah, peralihan sistem pertanian tradisional ke pertanian komoditas ekspor, serta munculnya kelas pekerja tani yang terikat secara koersif dengan kewajiban tanam paksa merupakan manifestasi nyata dari kolonialisme agraria. Seperti dijelaskan oleh Supriyono (2018) dalam jurnal *Patrawidya*, sistem ini melanggengkan subordinasi politik dan ekonomi masyarakat desa dalam struktur kolonial yang timpang.

Dengan pendekatan ini, penelitian tentang *Cultuurstelsel* di Banyuwangi tidak hanya menjadi studi tentang masa lalu, tetapi juga memiliki relevansi kontemporer dalam memahami akar ketimpangan agraria di Indonesia saat ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Lucas dan Warren (2013), warisan kolonial dalam bentuk struktur ekonomi dan relasi kuasa yang tidak adil masih dapat dilacak hingga ke masa kini, terutama di wilayah-wilayah bekas perkebunan besar seperti Banyuwangi. Oleh karena itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam upaya rekonstruksi sejarah agraria yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat akar rumput.

Melalui pemahaman mendalam terhadap konteks lokal seperti Banyuwangi, kita dapat mengidentifikasi pola-pola ketidakadilan yang berulang dan merumuskan solusi yang lebih kontekstual dan berakar pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga mendorong lahirnya kebijakan yang sensitif terhadap sejarah dan keberlanjutan sosial,

sehingga proses reformasi agraria tidak sekadar menjadi proyek administratif, tetapi juga upaya rekonsiliasi historis yang menyentuh akar permasalahan dan memulihkan hak-hak yang terpinggirkan sejak era kolonial.

Secara keseluruhan, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menyuarakan pengalaman lokal dalam sejarah kolonial Indonesia. Dalam hal ini, Banyuwangi menjadi contoh konkret dari bagaimana kebijakan kolonial yang bersifat makro diterjemahkan secara spesifik dalam konteks lokal, lengkap dengan dinamika sosial, budaya, dan resistensi yang menyertainya. Dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial dan teori kolonialisme agraria, kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami *Cultuurstelsel*, tidak semata sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai praktik kolonial yang membentuk lanskap sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode sejarah dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yakni merekonstruksi peristiwa masa lalu mengenai penerapan *Cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa di wilayah Banyuwangi pada periode 1830–1870. Metode sejarah memungkinkan peneliti untuk menyelidiki, menafsirkan, dan merekonstruksi proses sejarah secara kritis dan sistematis berdasarkan bukti-bukti yang dapat diverifikasi (Abdurrahman, 1999).

Metode penelitian sejarah mencakup empat tahap utama, yaitu: (1) heuristik (pengumpulan sumber), (2) kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi (penulisan sejarah) (Gottschalk, 1986). Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen primer dan sekunder yang relevan, baik berupa arsip kolonial, laporan pemerintahan Hindia Belanda, surat kabar abad ke-19, buku sejarah, hingga jurnal ilmiah kontemporer yang membahas tanam paksa di Jawa dan khususnya di Banyuwangi. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan nasional, arsip daerah, situs digital sejarah seperti KITLV, serta pangkalan data jurnal akademik seperti JSTOR dan Google Scholar.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yang dibagi menjadi kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menilai keaslian dokumen dan validitas fisiknya, sedangkan kritik intern menganalisis isi sumber secara mendalam untuk menilai kredibilitas dan objektivitas informasi yang terkandung. Proses ini penting untuk menyaring sumber-sumber yang bersifat bias kolonial atau bersifat propagandistik, sebagaimana dijelaskan oleh Kuntowijoyo (2003), yang menekankan pentingnya penggunaan pendekatan kritis dalam analisis sejarah Indonesia.

Setelah sumber-sumber dianggap layak dan sahih, tahap berikutnya adalah interpretasi. Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan data historis dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi masa itu. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan kerangka teori kolonialisme agraria dan pendekatan sejarah sosial. Hal ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh relasi kuasa, struktur agraria, dan transformasi masyarakat lokal akibat sistem tanam paksa (Peluso & Vandergeest, 2001; Wolf, 1982).

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan narasi sejarah secara kronologis dan tematik berdasarkan interpretasi yang telah dilakukan. Narasi sejarah disusun dengan mengedepankan pendekatan humanistik, yang menempatkan pengalaman dan suara masyarakat lokal sebagai fokus utama dalam menjelaskan dampak *Cultuurstelsel* di Banyuwangi. Tujuannya bukan hanya mengungkap fakta sejarah, tetapi

juga membangun kesadaran kritis tentang warisan kolonial dalam struktur agraria dan sosial masyarakat Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*), yakni dengan menelaah dokumen tertulis yang memiliki relevansi historis dengan tema penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi arsip kolonial Belanda, catatan administrasi pemerintahan Hindia Belanda di Banyuwangi, laporan inspeksi perkebunan, peta kolonial, surat menyurat, dan sumber pustaka sekunder seperti buku sejarah dan artikel jurnal ilmiah. Studi dokumen ini dilakukan dengan pendekatan kontekstual untuk menafsirkan makna sosial-politik dari setiap dokumen yang dianalisis (Bowen, 2009).

Melalui pendekatan metode sejarah dengan teknik studi dokumen ini, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran historis yang akurat, kritis, dan berimbang mengenai bagaimana sistem tanam paksa diterapkan secara spesifik di Banyuwangi, serta bagaimana masyarakat lokal menghadapinya dalam konteks dinamika kolonialisme abad ke-19. Penelitian ini berusaha menggali sumber-sumber primer yang ada, seperti arsip kolonial, catatan perjalanan, serta dokumentasi lokal yang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Banyuwangi pada masa itu. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami tidak hanya kebijakan yang diterapkan oleh penjajah, tetapi juga respons masyarakat lokal dalam menghadapi sistem yang menindas tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dan manusiawi, memperlihatkan perlawanan dan adaptasi yang terjadi di tingkat lokal, serta menganalisis dampaknya yang masih terasa hingga kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang dan Penerapan *Cultuurstelsel* (1830-1870)

VOC mengalami masa-masa kemunduran pada abad ke-18 (Aprilia et al., 2021). Terjadinya kemunduran yang dialami oleh VOC karena berbagai permasalahan perusahaan dagangnya. Salah satu permasalahan serius yang dialami VOC adalah maraknya pegawai VOC yang terlibat korupsi. Adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC sangat merugikan Belanda yang dampaknya adalah menurunnya pemasukkan kas perusahaan. Selain itu, kas negara Kolonial mengalami kekosongan akibat perang berkepanjangan yakni perang Jawa pada tahun 1825-1830 (Sondarika, 2015). Akhirnya, pemerintah Belanda membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799 karena praktik korupsi tersebut. Kekuasaan Hindia Belanda yang awalnya dipegang oleh VOC diambil alih Kolonial Belanda pada 1 Januari 1800 (Aprilia et al., 2021).

Golongan konservatif yang menguasai pemerintahan kolonial pada masa awal abad 19 memandang politik eksploitasi dengan penyerahan paksa peninggalan VOC sangat cocok untuk mengelola Hindia Belanda sebagai daerah *wingewest* atau daerah yang menguntungkan negeri induk (Susilo & Sarkowi, 2020). Sistem tersebut diterapkan dalam usaha eksploitasi produksi pertanian lahan atau tanah jajahan yang ditangani langsung oleh pemerintah kolonial. Usaha eksploitasi produksi pertanian ini diwujudkan dalam bentuk perkebunan negara oleh pemerintah kolonial. Sejak itulah Hindia Belanda memasuki kebijakan politik baru dalam bidang ekonomi yang sering disebut Sistem Tanam Paksa atau *Cultuurstelsel* (1830-1870).

Sistem tanam paksa atau *Cultuurstelsel* merupakan sebuah sistem yang dipelopori oleh Johannes Van den Bosch (Gubernur-Jenderal Hindia Belanda) pada tahun 1830. Akan tetapi bukanlah dia orang pertama Eropa yang menggunakan sistem pemanfaatan tanah dan ladang di Nusantara, melainkan Deandels dan disempurnakan oleh Raffles yang menerapkannya di awal abad ke-19 M dengan sebutan *land rent* atau sewa tanah

(Ichsan, 2016). Rafless dengan Van den Bosch sebenarnya memiliki tujuan yang sama tetapi dalam aplikasi kebijakannya berbeda. Saat Rafless kebijakannya adalah bagi hasil dan dianggap layak bagi pribumi serta mampu mencukupi kehidupan mereka, sedangkan Van den Bosch hanya memaksa rakyat untuk bekerja tanpa adanya upah. Tujuan utama Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa adalah untuk memenuhi atau mengisi kas pemerintah Belanda yang kosong akibat perang berkepanjangan.

Di wilayah Jawa, sistem tanam paksa atau tanam paksa ini diterapkan di daerah-daerah Gubernemen, yaitu daerah yang langsung dibawah oleh pemerintahan administratif Hindia Belanda, dengan pengecualian daerah Batavia, Buitenzorg, wilayah-wilayah *particuliere landerijen*, dan juga wilayah *vorstenlanden* (Aprilia et al., 2021). Penerapan sistem tanam paksa ini tidak hanya terjadi di Jawa saja melainkan hampir seluruh wilayah di Nusantara merasakan adanya sistem tanam paksa ini. Pemerintah kolonial Belanda memiliki kuasa atas 18 karesidenan, diantaranya Karesidenan Banten, Priangan, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Kedu, Bagelen, Banyumas, Madiun, dan Kediri (Aprilia et al., 2021).

Van den Bosch membuat kebijakan yang mana masyarakat pribumi harus menyerahkan "landrento" dengan bentuk tenaga kerja mereka untuk menanam tanaman ekspor yang laku di pasaran Eropa. Tiap desa diharuskan menyisihkan 20% sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor tersebut, seperti kopi, nila dan tebu (Sondarika, 2015).

Hasil panen nantinya akan dibeli pemerintah Belanda dengan harga murah dan kemudian diekspor ke luar negeri. Rakyat yang memiliki lahan hanya mendapatkan 20% dari hasil panen dan masih harus membayar pajak sebesar 40% kepada pemerintah Belanda dari hasil panen yang sudah dibeli dengan harga murah tersebut. Apabila penjualan hasil panen melebihi pajak tanah yang dibayarkan, maka mereka akan menerima lebihnya. Sedangkan apabila penjualan hasil panen kurang, desa tetap harus membayarkan kekurangan tersebut. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak (Sondarika, 2015). Petani sebagai produsen langsung sering kali berada di posisi paling bawah dalam struktur sosial-ekonomi, sehingga mereka selalu mengalami beban yang berat. Di sisi lain, golongan petani non-produsen atau elit non-produsen lainnya selalu mendapatkan keuntungan dari cara-cara yang mengambil surplus atau pendapatan dari petani (Sumakto, 2015).

Tahun 1832 peraturan ekspor diperketat oleh pemerintah kolonial Belanda, penjualan hasil panen rakyat ditekan serendah mungkin dan harus ditentukan oleh colonial (Susilo & Sarkowi, 2020). Pemerintah kolonial juga menekankan kepada rakyat bahwa tidak boleh menjual hasil panennya kepada pedagang lain. Pada dasarnya sistem sewa tanah adalah gabungan dari sistem menyerahkan wajib dengan sistem pajak tanah, sehingga ciri yang terdapat pada sistem tanam paksa ini adalah keharusan rakyat pribumi untuk membayar pajak berupa barang hasil panen mereka serta bukan dalam bentuk uang seperti sistem pajak pada umumnya. Adanya kebijakan ini memberikan keuntungan yang sangat besar kepada pemerintah kolonial Belanda.

Sampai akhirnya sisten tanam paksa ini dihapuskan pada tahun 1870 yang ditandai dengan masuknya dana asing atau masuknya penanaman modal ooleh bangsa Barat yang bertujuan mengambil bagian dalam eksploitasi sumber daya alam Indonesia (Aprilia et al., 2021). Penanaman modal yang dilakukan bangsa Barat ini mengakibatkan turunnya perekonomian Indonesia.

Penerapan Tanam Paksa di Banyuwangi

Jawa Timur merupakan salah satu wilayah utama pelaksanaan *Cultuurstelsel* di luar Jawa Tengah dan Barat yang lebih banyak dikaji. Sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman agroekologis serta jaringan pelabuhan aktif seperti di Surabaya dan Banyuwangi, Jawa Timur menjadi wilayah strategis dalam kebijakan ekonomi kolonial Belanda. Pelaksanaan sistem tanam paksa di wilayah ini difokuskan pada tanaman tebu, kopi, dan nila (Elson, 1994).

Penerapan sistem ini di Jawa Timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah lain karena adanya peran kuat elite lokal seperti bupati dan priyayi yang menjadi perantara kekuasaan kolonial. Menurut Ricklefs (2001), relasi kuasa antara elite kolonial dan penguasa lokal menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas sistem tanam paksa. Dalam konteks ini, masyarakat petani tidak hanya menjadi objek ekonomi, tetapi juga subjek dari sistem kekuasaan ganda: kolonial dan feodal.

Salah satu dampak besar dari penerapan *Cultuurstelsel* di Jawa Timur adalah terjadinya transformasi sosial dalam struktur desa dan ekonomi rumah tangga petani. Petani dipaksa mengalihkan sebagian lahannya untuk menanam tanaman ekspor, yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan pangan lokal. Boomgaard (1991) mencatat bahwa hal ini menyebabkan kerentanan pangan dan kelaparan periodik, terutama ketika hasil tanaman ekspor mengalami gagal panen atau keterlambatan distribusi.

Breman (2010) menambahkan bahwa praktik kerja paksa yang menyertai tanam paksa memperlihatkan sifat koersif sistem ini. Meskipun tidak seluruhnya menggunakan kerja paksa secara eksplisit, tekanan administratif dan kewajiban kuota produksi membuat petani berada dalam posisi subordinat, tanpa banyak pilihan.

Sebagai wilayah dengan lahan subur dan jalur dagang yang strategis, Banyuwangi menjadi salah satu daerah penting dalam pelaksanaan tanam paksa, khususnya untuk komoditas kopi dan tebu. Data sejarah menunjukkan bahwa sejak pertengahan abad ke-19, Banyuwangi mengalami perluasan perkebunan kopi yang dikelola secara langsung oleh pemerintah kolonial atau melalui sistem kontrak dengan pemilik perkebunan Eropa (Supriyono, 2018).

Penguasaan tanah di Banyuwangi pada masa itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan *landrente* dan tanam paksa. Sistem ini menyebabkan perubahan kepemilikan tanah yang semula bersifat komunal atau desa menjadi dikontrol oleh aparat kolonial dan elite lokal yang ditunjuk. Akibatnya, banyak petani kehilangan kemandirian agrarinya, dan muncul lapisan buruh tani tak bertanah yang menjadi bagian dari sistem kerja paksa perkebunan.

Meskipun sistem tanam paksa dijalankan dengan kontrol yang ketat, tidak berarti masyarakat Banyuwangi sepenuhnya tunduk. Beberapa bentuk resistensi muncul, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Stoler (2002) menunjukkan bahwa dalam banyak konteks kolonial, masyarakat lokal mengembangkan bentuk-bentuk perlawanan kultural seperti sabotase panen, pelambatan kerja, hingga migrasi ke wilayah yang belum sepenuhnya dikontrol kolonial.

Dalam konteks Banyuwangi, praktik penghindaran kerja paksa dengan berpindah ke daerah pinggiran atau perbukitan yang sulit dijangkau menjadi salah satu bentuk adaptasi. Selain itu, masyarakat juga menciptakan strategi bertahan seperti penguatan sistem gotong royong dan ekonomi subsisten yang minim intervensi kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa kendati berada dalam tekanan struktural kolonial, masyarakat lokal tetap memiliki agensi dan kapasitas untuk bertahan.

Sejak sistem tanam paksa masih dapat ditelusuri dalam struktur agraria dan ekonomi lokal Banyuwangi masa kini. Sebagian besar wilayah perkebunan besar yang dibentuk pada masa kolonial tetap eksis sebagai perusahaan negara atau swasta, dan kepemilikan lahan masih sangat timpang. Lucas & Warren (2013) menegaskan bahwa warisan kolonial dalam bentuk ketimpangan agraria merupakan persoalan yang terus membayangi pembangunan di Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak sistem tanam paksa tidak berhenti pada masa kolonial, tetapi terus beresonansi dalam struktur sosial-ekonomi kontemporer. Ketimpangan kepemilikan lahan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan dominasi modal besar atas wilayah-wilayah produktif menjadi tantangan serius bagi upaya pembangunan yang berkeadilan. Maka dari itu, refleksi historis terhadap warisan kolonial harus diiringi dengan langkah-langkah transformatif yang menysar redistribusi aset agraria, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pembentukan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Dalam kerangka ini, sejarah tidak hanya menjadi pelajaran masa lalu, tetapi juga pijakan untuk perubahan menuju masa depan yang lebih inklusif.

Lebih jauh lagi, penting untuk memahami bahwa bentuk-bentuk resistensi dan adaptasi masyarakat Banyuwangi terhadap sistem kolonial menunjukkan adanya dinamika lokal yang kaya dan tidak bisa disederhanakan hanya sebagai kepasrahan terhadap kekuasaan asing. Tradisi-tradisi lokal yang masih bertahan hingga kini, seperti upacara adat, sistem pertanian berbasis komunitas, serta ritual keagamaan yang khas, merupakan bentuk lain dari perlawanan kultural yang halus namun signifikan. Narasi ini menantang pandangan sejarah yang terlalu terpusat pada negara dan elite kolonial, serta membuka ruang untuk melihat masyarakat lokal sebagai subjek aktif dalam sejarahnya sendiri. Dengan menggali lebih dalam memori kolektif dan praktik budaya masyarakat, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai cara-cara lokal dalam menghadapi, menegosiasikan, dan bahkan mengubah tekanan struktural yang dihadirkan oleh kolonialisme.

Di sisi lain, memori kolektif masyarakat Banyuwangi terhadap era tanam paksa juga diwariskan melalui tradisi lisan, toponimi desa, hingga cerita rakyat. Kajian lokal semacam ini penting untuk memperkaya narasi sejarah nasional yang selama ini cenderung didominasi oleh sejarah pusat dan elite. Perkebunan ini merupakan salah satu perkebunan kopi pertama yang dibuka oleh pemerintah kolonial di Banyuwangi. Terletak di Kecamatan Giri, perkebunan ini mempekerjakan narapidana kasus ringan untuk bekerja di sana. Meskipun kini tidak lagi beroperasi sebagai perkebunan, sisa-sisa bangunan dan struktur perkebunan masih dapat ditemukan di area tersebut. Perkebunan Kopi Malangsari Terletak di Kecamatan Kalibaru, perkebunan ini dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi yang diminati pasar Eropa. Perkebunan ini terletak di wilayah pegunungan selatan Banyuwangi dan saat ini dikelola oleh PTPN XII. Setelah kesuksesan perkebunan kopi Sukaraja, pemerintah kolonial membuka kebun baru di kaki Gunung Ijen, termasuk di daerah Rante dan Pendil. Setiap perkebunan memiliki lebih dari 1.000 pohon kopi dan terletak pada ketinggian sekitar 900 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Dibangun pada tahun 1921 oleh kolonial Belanda, bendungan ini terletak di Kecamatan Tegalsari dan merupakan bangunan irigasi terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Bendungan ini dibangun untuk mengatur aliran Sungai Kalibaru dan mengairi 16.165 hektar sawah di sembilan kecamatan di Banyuwangi.

KESIMPULAN

Penerapan *Cultuurstelsel* di Banyuwangi pada abad ke-19 meninggalkan jejak sejarah yang signifikan, baik secara fisik maupun sosial budaya. Sistem tanam paksa yang difokuskan pada komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila telah membentuk lanskap agraria Banyuwangi dan memengaruhi struktur sosial masyarakatnya. Wilayah-wilayah seperti Sukaraja, Kalibaru, Glenmore, dan kawasan kaki Gunung Ijen menjadi sentra pelaksanaan kebijakan kolonial ini, memanfaatkan kondisi geografis yang sesuai dengan kebutuhan pertanian komersial kolonial.

Warisan fisik dari masa *Cultuurstelsel* masih dapat ditelusuri hingga kini dalam bentuk bangunan dan situs sejarah, seperti Asrama Inggris, Perkebunan Glenmore, dan Perkebunan Sukaraja. Tak hanya itu, situs-situs makam bupati yang berkuasa saat sistem ini berlaku, serta Museum Blambangan dan Kelenteng Hoo Tong Bio, memperkaya pemahaman kita terhadap kompleksitas sosial, ekonomi, dan budaya masa kolonial. Keberadaan tempat-tempat tersebut menunjukkan bagaimana sistem kolonial tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga terintegrasi dalam tata pemerintahan dan kehidupan religius masyarakat lokal.

Keberlanjutan warisan fisik tersebut menjadi saksi bisu dari proses panjang interaksi antara kekuasaan kolonial dan masyarakat lokal, yang membentuk lanskap sosial budaya hingga hari ini. Oleh karena itu, pelestarian situs-situs ini bukan hanya soal menjaga peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai upaya kritis untuk merefleksikan masa lalu dan memahami dampaknya terhadap identitas kolektif bangsa. Dalam konteks ini, pendekatan sejarah yang holistik sangat penting, agar warisan kolonial tidak semata dikenang sebagai bentuk penindasan, melainkan juga dipahami sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa menuju kemerdekaan dan kemandirian.

Dalam hal ini, pendekatan sejarah yang berbasis lokal menjadi sangat relevan untuk memperkaya narasi besar sejarah nasional yang selama ini cenderung bersifat sentralistik. Pengalaman Banyuwangi dalam menghadapi *Cultuurstelsel* membuka ruang untuk mengakui keragaman respons masyarakat terhadap kolonialisme—mulai dari bentuk perlawanan terbuka hingga strategi adaptasi yang lebih halus. Narasi-narasi semacam ini perlu diangkat dan dikembangkan dalam pendidikan, media, serta ruang-ruang publik agar generasi muda tidak hanya memahami sejarah sebagai deretan peristiwa, tetapi sebagai proses yang membentuk identitas, nilai, dan arah masa depan bangsa. Dengan demikian, studi lokal seperti ini berperan penting dalam membangun kesadaran historis yang kritis dan berkeadilan.

Warisan tersebut menjadi bagian penting dari identitas sejarah Banyuwangi dan memiliki nilai edukatif tinggi dalam menumbuhkan kesadaran historis masyarakat masa kini. Studi tentang *Cultuurstelsel* di tingkat lokal seperti Banyuwangi membuktikan bahwa sejarah kolonial tidak bersifat homogen, melainkan memiliki dinamika yang khas di setiap daerah. Oleh karena itu, pelestarian situs dan dokumentasi warisan *Cultuurstelsel* menjadi langkah strategis untuk menjaga memori kolektif bangsa sekaligus merefleksikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam sejarah nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A. T., Irawan, H., & Budi, Y. (2021). Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 119–134. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.465>

- Boomgaard, P. (1991). *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795–1880*. Amsterdam: Free University Press.
- Breman, J. (2010). *Keuntungan Kolonial dan Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720–1870*. Jakarta: KITLV-LIPI.
- Elson, R. E. (1994). *Village Java under the Cultivation System, 1830–1870*. Sydney: Allen & Unwin.
- H. K. (2015). Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 163–172. <https://doi.org/10.21831/socia.v11i2.5301>
- Ichsan, M. N. (2016). Perjuangan Dan Opium: Mengepul Asap Dari Sebatang Bambu, Kehidupan Petani Di Hindia Belanda Di Masa Cultuurstelsel. *Jurnal Kebudayaan*, 11(1), 35–48.
- Jawa, D. I., & Xix, A. (2024). *KEBIJAKAN KOLONIAL TENTANG KOPI DAN PAJAK*. 02, 1–15.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lucas, A., & Warren, C. (2013). *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Athens: Ohio University Press.
- Muhamad Naufal Shidqi Laras. (2021). Sistem Tanam Paksa : Praktik dan Dampaknya. *Essai, March*.
- Nawiyanto. (2012). Berakhirnya Frontir Pertanian: Kajian Historis Wilayah Besuki, 1870-1970. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 14(1), 77–98. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/88>
- Nugraha, M. S., & Mahzuni, D. (2023). Kelompok Lingkungan Hindia-Belanda: Pendirian Hingga Dampaknya Terhadap Konservasi Alam di Jawa 1912-1937. *Jurnal Siginjai*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.22437/js.v3i1.18569>
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Political ecologies of war and forests: Counterinsurgencies and the making of national natures. *Annals of the Association of American Geographers*, 92(3), 471–491.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c.1200* (2nd ed.). Stanford: Stanford University Press.
- SA'ADAH, U. (1900). Perkebunan Kopi Di Probolinggo Tahun 1830-1900. *Skripsi*, 298, 1–25.
- Sondarika, W. (2015). Dampak Cultuurstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870. *Jurnal Artefak*, 3(1), 59–66.
- Stoler, A. L. (2002). *Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule*. Berkeley: University of California Press.
- Sumakto, Y. (2015). Kebijakan Pertanahan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda Di Bali. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.26>
- Supriyono, E. (2018). “Dampak Tanam Paksa terhadap Struktur Agraria di Jawa Timur (Studi Kasus Banyuwangi).” *Patrawidya*, 19(2), 150–163.
- Susilo, A., & Sarkowi, S. (2020). Pengaruh Politik Cultuurstelsel Terhadap Perkembangan

- Masyarakat Indonesia Tahun 1830-1870. *SWADESI: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26418/swadesi.v1i1.35941>
- Syahbuddin. (2018). Involusi Pertanian Di Jawa 1830-1900 dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ips*, 8(1), 11-20. <https://doi.org/10.37630/jpi.v8i1.113>
- Wolf, E. R. (1982). *Europe and the People Without History*. Berkeley: University of California Press.
- Zulfikar, F., & Basundoro, P. (2017). Perkebunan Kopi di Banyuwangi tahun 1818-1865. *Jurnal Kesejarahan*, 11(2), 129-136.